

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil temuan penelitian. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab masalah penelitian. Setelah mendeskripsikan hasil temuan dilanjutkan dengan analisis. Analisis yang dilakukan merupakan interpretasi peneliti terhadap temuan-temuan penelitian yang didukung oleh teori yang dipandang relevan yaitu teori tata kelola Good Corporate Governance. Teori ini menjelaskan mengenai pendekatan kelembagaan yang mampu serta lengkap dalam mengupas Bumdes. Dengan memfokuskan pada beberapa Indikator yaitu : Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, Akuntabel, Sustainable.

5.1. Kooperatif

Kooperatif merupakan semua komponen terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

5.1.1. Mekanisme Kerja Sama Pihak BUMDes dan Pihak Lain Dalam Pengembangan Usaha

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh yang Sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset dan usaha lainnya, untuk

kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes sebagai badan usaha membuat BUMDes dapat melakukan berbagai hal salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak maupuun dalam tim tersebut untuk pembangun BUMDes. Untuk menggambarkan mengenai mekanisme kerja sama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha maka penulis melakukan wawancara dengan beberap informan yakni.

Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“mengenai kerja sama kami dari pengurus BUMDes dan juga pemerintah membangun kerja sama dengan pihak lain guna mendukung pembangunan dan pengelolahn BUMDes 7 Maret, mekanisme kerja tersebut berupa adanya pengadaaan modal yang pertama kami dapatkan melalui pemerintah pusat dengan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pemberdayaan Desa. Modal tersebut kami manajemen sebaik mungkin guna meningkatkan pendapatan Desa melalui unit usaha yang saat ini yakni usaha ikan teri dan juga pariwisata. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemens Kwaman), menyatakan bahwa

“mechanisme awal dalam kerja sama terutama modal awal secara terperinci seperti yang diungkapkan oleh Bapak Direktur, jadi terjadi perputaran modal dan pendapatan untuk pengembangan unit usaha sehingga berjalan secara bersama-sama. Untuk modal awal tentunya dari pemerintah pusat melakukan program dari Bapak Jokowi pemberdayaan Desa. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengurus BUMDes (Alexia Decantis Pulo Lasar), menyatakan bahwa

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur dan Bapak Desa bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes 7 Maret tentunya kerja sama dengan pihak luar merupakan salah satu bentuk untuk kemajuan dari BUMDes tersebut mengingat dalam pengembangan BUMDes dana bisa diperoleh dari pihak luar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja sama yang dibangun oleh pemerintah Desa dan juga pengurus BUMDes awalnya bersumber dari Dana Modal yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui program pemerintah pusat dalam pemberdayaan masyarakat. Modal tersebut dikelola dalam pengembangan unit usaha yang awalnya hanya unit usaha ikan teri dikembangkan kembali sehingga dibuka kembali unit usaha pariwisata. Hal tersebut

dilakukan guna mendukung kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Hadakewa.

Gambar 5.1. Dokumentasi Kerja Sama Dengan Pihak Lain



5.1.2. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Konflik dan Masalah

Pemerintah Desa sebagai lembaga pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat tentunya memiliki fungsi secara umum yakni melayani masyarakat secara baik. Masyarakat Desa sebagai bagian dari pemerintahan yang menjadi objek sasaran dalam pelayanan, tentunya memiliki hak pengaduan apabila dalam pelayanan tidak berpihak kepada masyarakat dan pemerintah Desa juga harus menjadi jembatan bagi masyarakat apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi konflik sosial antar masyarakat. Untuk menggambarkan mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik dan masalah maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni : Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“dalam menyelesaikan konflik baik dalam ruang lingkup BUMDes maupun dengan masyarakat tentunya kami dari pihak pengurus maupun pemerintah melakukan diskusi secara baik konflik apa yang terjadi sehingga adanya diskusi langsung dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi baik dalam internal pengurus, pemerintah Desa Hadakewa dan juga masyarakat, tapi sampai saat ini konflik sering terjadi (konflik pengelolaan aset desa yang kadang tanpa pengaturan regulasi yang jelas antara masyarakat dan juga pemerintahn BUMDes), namun semuanya dapat terselesai dengan baik tanpa adanya kekerasan mengingat unsur kebersamaan antar kami disini bias dikatakan cukup baik, ini juga merupakan salah satu bentuk dinamika kelompok” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal yang sama juga seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemens Kwaman), mengatakan bahwa

“konflik tentunya sering terjadi tapi selalu diselesaikan secara kekeluargaan guna mendukung pembangunan dan pengembangan Desa melalui unit usaha ini. Jadi ya kami selalu bersama-sama dengan masyarakat mendiskusikan penyelesaian konflik yang sering terjadi dengan mengedepankan rasa kemanusiaan antar sesama kami di ruang lingkup Desa ini. Tentunya musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu jalan yang kami ambil baik antar pemerintah Desa, pengurus

BUMDes maupun masyarakat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hadakewa, pengurus BUMDes dan masyarakat melalui proses diskusi yang dilakukan secara bersama dengan mengedepankan ras kemanusiaan sehingga tidak terjadi konflik yang diinginkan. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu jalan yang diambil dalam memecahkan masalah atau konflik yang terjadi didalam ruang lingkup pemerintah Desa Hadakewa, Pengurus BUMDes dan masyarakat.

Gambar 5.2. Musdes Penyelesaian Konflik



5.2. Partisipatif

Partisipatif merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif

masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

5.2.1. Pendirian BUMDes disepakati Melalui Musdes Dengan Melibatkan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda, PKK, Gapoktan, Pelaku Usaha dan Tokoh Lainnya

BUMDes dapat diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa yang bertujuan membahas pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta ditetapkan dalam peraturan desa.

Untuk menggambarkan mengenai Pendirian BUMDes disepakati Melalui Musdes Dengan Melibatkan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda, PKK, Gapoktan, Pelaku Usaha dan Tokoh Lainnya, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni : wawancara dilakukan dengan kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemens Kwaman), mengatakan bahwa

“Pendirian BUMDes ini tentunya ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa hal ini juga terjadi bukan hanya di Desa Hadakewa hampir seluruh Desa yang ada diindonesia. Awal pendirian BUMDes 7 Maret ini tentunya saya selaku

pemimpin Desa Hadakewa tentunya melakukan diskusi dengan seluruh lapisan masyarakat mulai dari awal perencanaan sampai pada tahap pengembangan unit usaha, kami dari pemerintah Desa tentunya menjabarkan secara terperinci kepada masyarakat bahwa pembentukan BUMDes ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang diwadahi melalui setiap Desa. Mulailah diskusi berjalan sampai dengan tahap ini sudah dua unit usaha yang kami dirikan yakni usaha ikan teri dan pariwisata” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni (Bapak Emanuel Wai Tukan), menyatakan bahwa

“hampir disetiap program dari Desa ini pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam mendiskusikan program tersebut. Hal tersebut juga tidak terlepas dari awal pembentukan BUMDes 7 Maret ini pemerintah Desa melakukan diskusi dengan kami seluruh lapisan masyarakat di Desa ini untuk pengembangan apa yang harus dikembangkan, melihat kami disini memiliki potensi laut yang cukup baik kami semua memutuskan untuk sama-sama mencoba usaha jenis ikan teri ini seiring berjalan waktu sampai saat ini kinerja dari pemerintah Desa cukup baik dan kerja yang baik dari Pengurus BUMDes 7 Maret ditambah lagi

salah satu unit usaha yakni usaha pariwisata” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes 7 Maret merupakan hasil kesepakatan bersama melalui Musdes. Musyawarah tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Hadakewa guna menentukan unit usaha apa yang harus dikembangkan. Dengan adanya kesepakatan bersama tentunya dalam pengembangan unit usaha berjalan sesuai kesepakatan yang ditentukan diawal hal tersebut tentunya berhasil dengan adanya diskusi tersebut Pemerintah Desa Hadakewa menambah lagi satu unit usaha pariwisata melalui modal yang didapatkan dari pengembangan unit usaha ikan teri

5.2.2. Pemilihan dan Unit Usaha BUMDes Mendapatkan Masukan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda, PKK, Gapoktan, Pelaku Usaha dan Tokoh Lainnya

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah kebijakan yang memberikan sebuah angin segar bagi masyarakat. BUMDes hadir untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, yang dikelola langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan keterlibatan masyarakat dalam perangkat Desa, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, gapoktan, pelaku usaha dan tokoh lainnya. Untuk menggambarkan mengenai pemilihan dan unit usaha BUMDes mendapatkan masukan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha dan

tokoh lainnya, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni : wawancara dilakukan dengan kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemens Kwaman), mengatakan bahwa

*“seperti yang dijabarkan diawal bahwa pemilihan jenis usaha ini tentunya kami dari pemerintah Desa maupun pengurus BUMDes 7 Maret melibatkan seluruh masyarakat dalam pemilihan unit usaha sehingga memang benar2 hal tersebut merupakan keputusan bersama bukan hanya keputusan pribadi yang diambil oleh pemerintah Desa atau pengurus BUMDes”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)*

Hal senada juga dijabarkan oleh salah satu tokoh masyarakat (Emanuel Wai Tukan), mengatakan bahwa

“penentuan unit usaha ini merupakan keputusan bersama, pemerintah Desa melibatkan kami masyarakat untuk mengambil bagian dalam penentuan unit usaha ini jadi ya memang benar-benar keputusan bersama antar kami masyarakat dan juga pemerintah Desa Hadakewa” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penentuan jenis usaha di BUMDes 7 Maret merupakan hasil keputusan secara bersama antara tokoh masyarakat dan juga pemerintah, sehingga tidak hanya melibatkan salah satu

pihak sajah melainkan semua pihak terlibat didalamnya dalam penentuan unit usaha tersebut.

5.2.3 Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha

Keterlibatan masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu yang berdampak pada pencapaian kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan BUMDes. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan dukungan masyarakat dalam menciptakan program desa bukan hanya mendukung program desa. Oleh karena itu, adanya keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam menjalankan lembaga Badan Usaha Milik Desa. Keterlibatan masyarakat juga merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDes 7 Maret, Untuk menggambarkan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni : Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“sampai dengan saat ini masyarakat terlibat aktif baik dalam pengembangan unit usaha baik ikan teri maupun pariwisata, kami sebagai pengembang BUMDes 7 maret melibatkan masyarakat dalam pengembangan unit usaha dengan melibatkan mereka dalam setiap unit usaha baik sebagai karyawan maupun sebagai penjaga di setiap unit usaha hal tersebut kami lakukan guna melibatkan masyarakat dalam

pengembangan unit usaha” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni (Bapak Emanuel Wai Tukan), mengatakan bahwa

“kami sebagai masyarakat sangat dilibatkan dalam pengembangan unit usaha dalam BUMDes 7 Maret dengan model dan cara masing- masing hal tersebut seperti yang digambarkan oleh Bapak Direktur jadi ya memang harus adanya keterlibatan antar kami masyarakat dan pemerintah Desa guna mendukung kemajuan dari BUMDes 7 Maret” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Hadakewa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes 7 Maret sangat baik hal tersebut terimplementasi dalam setiap masyarakat mengambil bagian dalam pengembangan unit usaha BUMDes, dan adanya kerjasama yang baik antar pengurus BUMDes 7 maret dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di setiap unit usaha.

5.3. Transparansi

Transparansi artinya aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam BUMDes bagi desa yang menjalankannya.

5.3.1. Sistem Pemilihan Pengelolaan BUMDes dan Unit-Unit Usaha BUMDes

Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan keadaan Desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan. BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara bersama. Untuk menggambarkan mengenai sistem pemilihan pengelolaan BUMDes dan unit-unit Usaha BUMDes yang ada di BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, yakni

Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“kalau mengenai sistem pengelolaan BUMDes dan unit usaha-usaha BUMDES pemerintah Desa Hadakewa selalu sangat terbuka dengan masyarakat dengan memberikan informasi dan mendiskusikan kepada masyarakat mengenai pemilihan jenis usaha ini dengan menjabarkan secara langsung kepada masyarakat pada saat rapat terbuka dan selalu melaporkan perkembangan unit usaha BUMDes baik secara terbuka

maupun informasi melalui media online dan website resmi dari Desa Hadakewa” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh pengurus BUMDes 7 Maret (Alexia Decantis Pulo Lasar), menyatakan bahwa

“Dari kami pengurus BUMDes, Kepala Desa dan Direktur selalu terbuka dengan masyarakat Desa Hadakewa mengenai pengembangan Unit Usaha Bumdes Yang Akan dirintis dan mendiskusikan secara langsung pada saat rapat bersama untuk disetujui usaha mana yang pantas dikembangkan di BUMDes Desa Hadakewa. Dan juga keterbukaan informasi selalu dikedepankan guna menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyajikan informasi pada media online website resmi yang ada” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Wawancara dengan Kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemen Kwa...) mengatakan bahwa

“Untuk pemilihan pengelolaan unit – unit usaha BUMDes saat ini seperti usaha ikan teri dan pariwisata. Tentu awal pembentukan unit usaha ini kami melakukan diskusi terbuka dengan seluruh masyarakat Desa Hadakewa dengan menggambarkan kepada masyarakat pada saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Kami selaku pimpinan Desa menjabarkan kepada masyarakat Desa Hadakewa bahwa dibawah

naungan BUMDes 7 Maret akan membuka unit usaha sekian-sekian. Sehingga memang benar unit ushaa tersebut disetujui melalui musyawarah dan mufakat dan baru dijalankan pada saat terjadi keputusan bersama” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemilihan pengelolaan BUMDes 7 maret dan unit-unit usaha BUMDes bisa dikatakan memiliki keterbukaan yang baik antara pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan masyarakat hal tersebut dijabarkan melalui jawaban dari setiap responden bahwa terjadi diskusi dengar pendapat antara pemerintah Desa pengurus BUMDes dan masyarakat dalam menentukan unit usaha yang akan dikembangkan di BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa.

5.3.2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelola BUMDes (Keuangan, Kinerja dan Pengembangan Usaha

Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes dalam pendirian dan pengelolaan BUMDesa terdiri atas susunan kepengurusan organisasi pada pihak pengelola dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes. Organisasi perlu menjalankan mekanisme pertanggungjawaban untuk meningkatkan kemauan pada individu atau kelompok dalam menyadari peran serta tugas sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai keberlanjutan organisasi dalam mengembangkan usaha. Pertanggungjawaban merupakan karakteristik yang mempengaruhi organisasi, kemauan individu dan kelompok dalam merespons tekanan eksternal seperti aturan terkait peran dalam

melaksanakan tugas. Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui website resmi Desa Hadakewa mengenai Pertanggungjawaban Pengelola BUMDes (Keungana, Kinerja dan Pengembangan Usaha). Hal tersebut diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan direktur BUMDes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“Bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pengurus BUMDes 7 maret dari 3 aspek yakni keuangan, kinerja dan pengembangan usaha saat ini tentunya kami sangat selalu terbuka dengan masyarakat mengenai 3 hal tersebut. Model pertanggungjawaban kami kepada masyarakat itu kami memberikan gambaran keuangan BUMDes mengenai website resmi Desa hadakewa dan juga pada saat rapat bersama membahas mengenai pengelolaan BUMDes. Kinerja dan juga pengembangan usaha tentunya hal itu menurut saya pribadi bias dilihat melalui prospek kemajuan dari BUMDes yang dapat dinilai oleh masyarakat itu sendiri, tapi kalau informasi mengenai keuangan kami sangat terbuka seluruh elemen bias mengakses tanpa ada sekat. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Wawancara dengan Kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemen Kwa...) mengatakan bahwa

“untuk 3 aspek tersebut kami sangat terbuka bukan hanya masyarakat Desa yang bias mengakses mengenai keterbukaan dalam aspek keuangan

tapi seluruh elemen masyarakat luar juga bisa tau informasi mengenai keuangan Desa Hadakewa melalui website resmi Desa Hadakewa, karena kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Bicara soal uang hal yang sangat sensitif jadi saya selaku pimpinan juga selalu melakukan arahan kepada seluruh pengurus BUMDes untuk terbuka kepada masyarakat.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah Desa Hadakewa dan pengurus BUMDes 7 Maret pada ketiga aspek yakni keuangan, kinerja dan juga pengelolaan BUMDes dikatan sangat baik karena informasi mengenai ketiga aspek tersebut dapat diakses secara terbuka bukan hanya masyarakat Desa Hadakewa melainkan masyarakat luar melalui halaman website resmi Desa Hadakewa.

Gambar 5.3. Musdes Pendirian BUMDes



5.4. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah/public. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel.

5.4.1. Arah dan Kebijakan Strategi BUMDes 7 Maret

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Strategi pada umumnya akan membahas tentang penerapan tujuan jangka Panjang dan arah kebijakan untuk mencapai arah dan tujuan yang akan dicapai tersebut. Untuk menggambarkan mengenai arah dan kebijakan di BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, maka penulis melakukan wawancara dengan beberpa informan, yakni

Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“tentu awal dalam membangun BUMDes 7 Maret dalam meningkatkan pendapatan Desa Hadakewa dan dengan tujuan memajukan kesejahteraan

masyarakat setempat pastinya perencanaan hal yang dasar yang kami lakukan disini kami mendiskusikan hal tersebut dengan masyarakat mengenai strategi pengembangan BUMDes 7 Maret mulai dari strategi pengembangan usaha, startegi market atau pasar dalam pemasaran usaha dan permodalan awal. Seiring berjalnya waktu 3 hal tersebut berjalan dengan baik sehingag strategi yang diterapkan sebelumnya dijalankan terus sampe sekarang hal tersbeut terbukti dengan pada tahun 2020 mendapat nominasi 15 BUMDes digital nasional yang mewakili NTT. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Wawancara dengan Kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemen Kwa...) mengatakan bahwa

“untuk arah dan kebijakan startegi BUMDes kedepan tentunya harus lebih baik lagi dari sekarang, tentunya hal atau aspek yang bisa menghambat kemajuan BUMDes yang terjadi pada sata pengelolaan BUMDes tentu harus diperhatikan kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk strategi tentunya tetap sama mulai dari aspek produksi usaha unit ikan teri maupun pariwisata sampe aspek pemasaran tentunya kami mais sama dengan memperkenalkan BUMDes 7 Maret kepada masyarakat luar melalui media online yakni website dan juga halaman resmi Desa Hadakewa yang ada di FB dan juga Instagram, mengingat kekuatan media sosial saat ini sangat mendorong dalam kemajuan Desa apabila

dimanfatakan dengan baik. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa arah dan startegi kebijakan BUMDes 7 maret masih menggunakan strategi gaya lama yaitu aspek produksi dan pemasaraan masih mengandalkan kehadiran teknologi dalam mempromosikan unit usaha baik ikan teri maupun pariwisata mengingat startegi tersebut diterapkan dan dengan pengelolaan BUMDes yang baik dapat menghantarkan BUMDes 7 Maret mendapat nominasi 15 Desa Digital Nasional pada tahun 2020.

5.4.2. Document Rencana Usaha

Rencana Usaha BUMDes adalah suatu dokumen yang mana berisi usulan rencana dari pada program dan kegiatan manajemen unit usaha yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rencana Usaha ini berlaku untuk semua unit usaha yang akan dikelola. Tanpa adanya rencana usaha dan studi kelayakan BUMDes, maka usaha BUMDes tidak akan diberikan bantuan permodalan atau dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa. keberadaan rencana usaha ini penting sebagai dokumen yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana model kerja sama. Selain itu, mereka yang akan kerja sama dengan kita pun dapat melihat terlebih dahulu seperti apa usaha BUMDes sejak awal, sejak dalam rencana usaha dan kondisi terbaru saat ini. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan mengenai dokument resmi rencana usaha BUMDes 7 Maret. Hal tersebut diatas juga didukung dengan hasil

wawancara yang dilakukan dengan direktur BUMDes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“Document resmi rencana usaha untuk setiap BUMDes tentunya pasti ada, tentunya dikami BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa juga selalu memperhatikan hal tersebut sebaaai bentuk pertanggungjawabn kami kepada masyarakat jadi hal tersebut benar-benar kami perhatikan dengan baik, sebagai dasar hukum dalam pengelolaan BUMDes 7 Maret”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemen Kwa...) mengatakan bahwa

“untuk setiap pngembangan usaha tentunya ada dokumen resmi di BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa ini juga kami menyiapkan hal tersebut mulai dari awal perencanaan sampai pendirian sampe tahap akir laporan keuangan semuanya ada, tentunya hal tersebut menjadi landasan hukum atau dasar hukum dalm pengembangan unit usaha yang kami dirikan saat ini dan juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban resmi saya selaku kepala Desa kepada seluruh masyarakat Desa Hadakewa.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa arsip document rencana usaha BUMDes 7 Maret sangat diperhatika dengan baik, dimana hal

tersebut dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum pengelolaan BUMDes dan juga merupakan bentuk fisik pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pengurus BUMDes kepada masyarakat sehingga tidak terjadi klaim kepemilikan usaha.

5.4.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDes serta hasil yang telah dicapai, laporan mengenai kegiatan utama BUMDes dan perubahan selama tahun buku, laporan rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDes, dan laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan mengenai standar operasional prosedur (SOP) penyusunan Laporan Keuangan BUMDes 7 Maret. Hal tersebut diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan direktur BUMDes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“standar operasional prosedur (SOP) penyusunan laporan keuangan yang kami buat di BUMDes 7 Maret tentunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58, yakni adanya didalam SOP adanya laporan realisasi anggaran adanya laporan keuangan setiap 6 bulan dan juga adanya laporan keuangan setiap tahunan hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk keterbukaan kami terhadap masyarakat. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemens Kwan..) mengatakan bahwa

“penyusunan laporan keuangan BUMDes desa hadakewa kami terapkan dengan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 yang terdapat tiga aspek penting seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa SOP penyusunan laporan keuangan BUMDes 7 Maret sangat baik karena mengacu pada SOP laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58, yakni adanya laporan realisasi anggaran, laporan keuangan 6 bulan sekali dan laporan tahunan.

5.4.4. Laporan Keuangan BUMDes Secara Berkala

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Tujuannya untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari. BUMDes juga diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel secara berkala. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan mengenai laporan keuangan BUMDes 7 Maret . Hal tersebut diatas juga didukung

dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan direktur BUMDes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“kami selaku pengurus BUMDes 7 maret tentunya hal tersebut sangat kami perhatikan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan tentunya sebagai bentuk keterbukaan kami pada aspek keuangan terhadap masyarakat seperti yang saya sampaikan bahwa semua laporan keuangan kami laporkan secara berkala yakni pada 6 bulan sekali dan setahun sekali” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

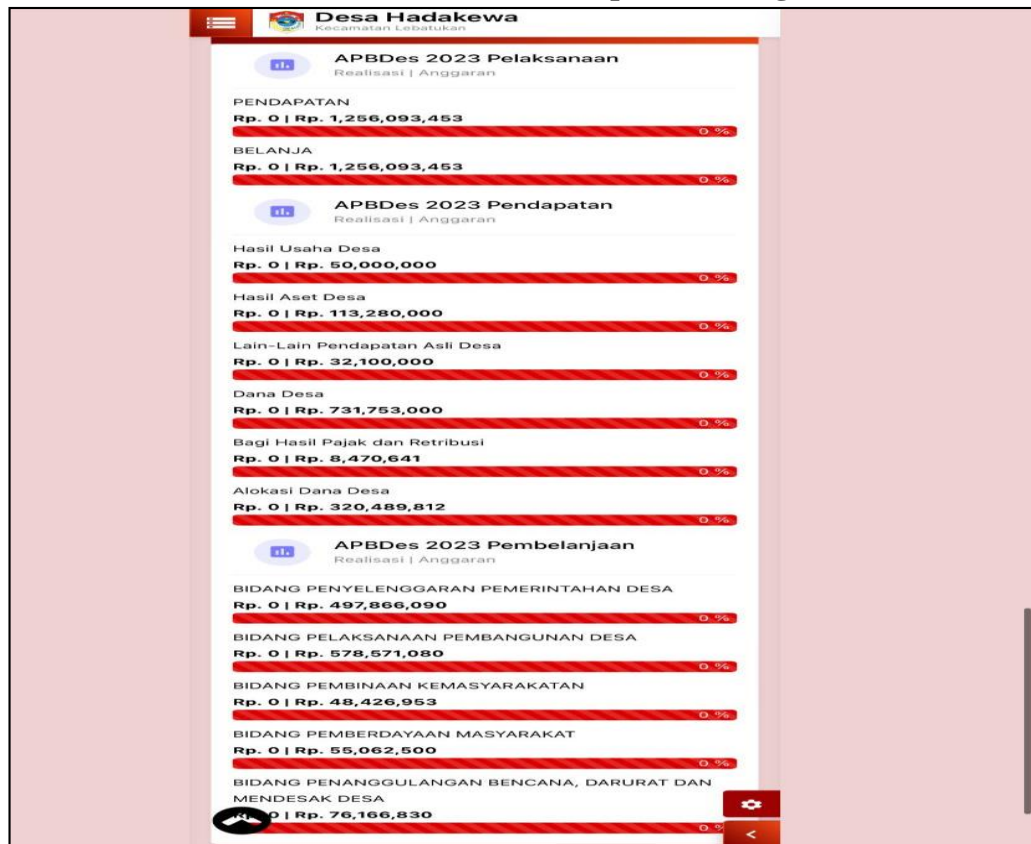
Jawaban yang sama juga diungkapkan oleh pengurus BUMDes yakni (Ibu Alexia Decantis Pulo lasar), mengatakan bahwa

“keterbukaan laporan keuangan yang kami sampaikan kepada masyarakat kami sangat terbuka baik ada dihalaman resmi website Desa maupun adanya laporan secara berkala yang seperti bapak direktur uraikan bahwa adanya laporan keuangan secara berkala guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes 7 Maret” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan secara berkala yang dilakukan oleh BUMDes 7 maret Desa Hadakewa sangat baik karena mereka selalu mengedepankan kepercayaan masyarakat dengan mengadakan laporan keuangan secara berkala yang terjadi selama 6 bulan sekali dan

tahunan mereka juga memberikan informasi keuangan melalui website resmi Desa dengan menjabarkan secara lengkap document keuangan Desa.

Gambar 5.4. Dokument Laporan Keuangan



5.5. Sustainable

Sustainable atau pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

5.5.1. Survei Kebutuhan Masyarakat

Pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Untuk menggambarkan mengenai kebutuhan masyarakat Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, maka penulis melakukan wawancara dengan beberpa informan, yakni

Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“kebutuhan masyarakat kami dari pengurus BUMDes maupun pemerintah Desa sangat memperhatikan hal tersebut. Hal tersebut kami lakukan agar tidak terjadi mandek dalam melakukan produksi terutama usaha unit ikan teri karena masyarakat pasti membutuhkan banyak fasilitas jadi saya selaku direktur BUMDes dan kepala Desa Hadakewa selalu melakukan survei guna melihat keadaan atau kekurangan dilapangan seperti apa dan kebutuhan apa yang masyarakat butuhkan. Hal tersebut sangat membantu kami dalam pengembangan kemajuan BUMDes ini. Mengingat dalam

pengembangan unit-unit usaha ini perlu adanya hubungan kerja sama antar masyarakat dan juga pemerintah Desa dan pengurus BUMDes. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu anggota masyarakat (Kanisius Ile Lengari), mengatakan bahwa

“untuk pemerintah Desa dan juga pengurus BUMDes sering sekali melakukan survei untuk melihat kebutuhan kami sebagai nelayan ada hal yang kurang seperti jarring maupun alat tangkap lainnya sering sekali pemerintah Desa dan BUMDes memfasilitator itu sehingga kebutuhan kami pada saat melaut tidak terjadi kendala” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu anggota masyarakat (Hamid Tundru), mengatakan bahwa

“pemerintah Desa dan pengurus BUMDes sering sekali turun untuk melihat kebutuhan kami para nelayan ada hal yang kurang mengenai alat tangkap kami sering sampaikan kepada mereka dan sering diadakan jadi ya kami sebagai masyarakat merasa sangat membantu dengan hadirnya BUMDes dan pemerintah Desa Hadakewa” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa dan BUMDes sering melakukan survei awal dengan tujuan untuk melihat kebutuhan masyarakat dilapangan terutama dalam usaha ikan teri dan mendiskusikan dengan masyarakat mengenai kekurangan apa dilapangan. Pemerintah Desa dan juga BUMDes juga bergerak sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan masyarakat hal tersebut dilakukan guna mendukung dan menjalin hubungan kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah Desa dalam mengembangkan unit usaha BUMDes desa 7 Maret.

5.5.2. Perolehan Feedback Stackholder BUMDes (Konsumen, Pemasok dan Masyarakat)

Pengelolaan BUMDes akan melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan sandang dan papan juga sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal, masyarakat desa yang tergolong pendapatannya rendah. Tentunya tanggapan balik dari para masyarakat maupun pihak luar atau konsumen sangat menentukan kemajuan dari BUMDes itu sendiri. Untuk menggambarkan mengenai perolehan feedback stackholder, pemasok dan masyarakat maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni :

Wawancara yang dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat (Maria Avia Kewa Losor), mengatakan bahwa

“selama ini untuk pengembangan unit usaha ikan teri dan pariwisata sangat baik saya sebagai masyarakat disini menilai bahwa kinerja pemerintah dan juga pengurus BUMDes sangat tinggi dalam mengembangkan dua unit usaha tersebut hal tersebut dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh Desa Hadakewa, namun saya sebagai masyarakat dan sebagai kaum akademika melihat ada berapa hal yang sangat kurang yakni SDM yang ada di Desa Hadakewa masih sangat rendah sehingga bagaimana partisipasi masyarakat sangat kurang keberhasilan usaha unit ikan teri dan pariwisata merupakan salah satu bentuk menyadarkan masyarakat bahwa di Desa ini juga banyak potensi dan harus dikembangkan namun yang menjadi penekanan saya disini perlu adanya penguat SDM. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Wawancara yang dilakukan oleh salah satu konsumen pada BUMDes Desa Hadakewa (Emanuel Radja), mengatakan bahwa

Produk ikan teri dan pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Hadakewa sangat baik saya selaku salah satu konsumen dari produk ikan teri tersebut merasa sangat baik mulai dari pengemasan dan harga bias dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga bagaimana

memperoleh informasi penjualan menurut saya pribadi sangat maju sesuai dengan tuntutan Zaman mengingat semua informasi mengenai hal tersebut dapat kita peroleh melalui media online karena aspek pemasaran menggunakan media online dan juga untuk unit pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes 7 Maret sangat baik karena menampilkan wahana permainan dan untuk makanan unit pariwisata menampilkan makanan local khas orang lembata. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan diruang lingkup Desa Hadakewa yakni adanya penguatan SDM untuk seluruh lapisan masyarakat hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh responden. Dan untuk pengembangan unit usaha ikan teri dan pariwisata sangat baik mengingat bahwa harga dan keterjangkaun memperoleh informasi mengenai kedua unit usaha tersebut sangat mudah karena digunakan media online sebagai wadah untuk mempersentasikan unit usaha BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa.

5.5.3. Cara Atau Upaya Menghindari *Conflik Of Interest*

Sistem manajemen resiko. BUMDes perlu memiliki sistem manajemen resiko sebagai upaya untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu resiko yang dihadapi oleh perusahaan jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Manajemen resiko memiliki teknik yang dapat mengukur suatu pengelolaan resiko pada organisasi bisnis yakni resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko pasar, resiko

hukum, resiko strategik dan resiko reputasi yang dapat dilakukan oleh manajer atau ketua dalam mengelola operasional kegiatan usaha organisasi bisnis BUMDes. Untuk menggambarkan mengenai cara atau upaya menghindari *Conflik Of Interest* maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni :

Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“kami dari pengurus BUMDes dan juga pemerintah Desa Hadakewa tentunya perlu memperhatikan hal ini sangat baik, mengingat disalah stau sisi dua unit usaha ini bisa dikatakan sangat besar dengan keuntungan yang diperoleh dari dua unit usaha ini sangat menjanjikan dan pastinya hal tersebut sangat diperhatikan mengingat konflik kepentingan ini sangat marak dimasyarakat apalagi SDM di Desa ini bisa dikatakan masih sangat rendah sehingga edukasi mengenai BUMDes ini adalah milik bersama seluruh lapisan masyarakat sangat digaungkan pada saat rapat dengar pendapat sehingga tidak terjadi salah paham antara masyarakat dan juga pemerintah Desa, dan memang benar-benar mengedepankan rasa kebersamaan untuk membangun Desa hadakewa kearah yang lebih baik”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat (Maria Pulo Nihan), mengatakan bahwa

“saya sebagai salah satu masyarakat yang menetap di Desa ini tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi (konflik Kepentingan), mengingat selama ini kinerja dari BUMDes 7 Maret sangat baik dalam melakukan pemberdayaan dengan masyarakat jadi saya sangat tidak wajar kalau konflik antar masyarakat dan juga pemerintah mengani hal tersebut, mengingat BUMDes ini ada untuk kepentingan kami. Namun sering sekali adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat bahwa pembanguan unit usaha ini untuk kepentingan kita bersama dan tidak adanya kepentingan golongan maupun individu jaid mungkin itu bias dipahami secara bersama oleh seluruh masyarakat Desa Hadakewa” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Hadakewa dan pengurus BUMDes sering melakukan sosialisasi berupa penyampaian kepada masyarakat bahwa pengembangan unit usaha ini dibawah naungan BUMDes 7 Maret merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan Desa dan juga kesejahteraan masyarakat sehingga tidak terjadi adanya konflik kepentingan antar masyarakat maupun pemerintah Desa Hadakewa.

5.5.4. Revisi Pengembangan Usaha

Pada dasarnya BUMDes merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga ekonomi desa. dibuatnya BUMDes bertujuan agar potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar, sosial, budaya dan alam mampu dikelola sebesar-besarnya oleh desa khusus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pengembangan kemampuan sumber daya alam sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa, masyarakat miskin di wilayah dusun pada khususnya. Berjalan usaha BUMDes tentunya memiliki banyak kendala dan tantangan, solusi merupakan salah satu jalan dalam merevisi jenis usaha yang memiliki tantangan dan kendala sebagai bentuk revolusi terhadap kemajuan BUMDes. Untuk menggambarkan mengenai revisi Pengembangan Usaha maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni :

Wawancara dilakukan dengan Direktur Bumdes 7 Maret (Bapak Bernadus Daniel Ola), mengatakan bahwa

“setiap 6 bulan dan setahun sekali selalu kami adakan pertemuan dengan masyarakat selain melaporkan keungan dan pendapatan didua unit usaha ini kami juga melakukan diskusi mengenai pengembangan unit usaha kedepan seperti apa dan melakukan revisi pada dua unit usaha tersebut hal yang kurang dimana dan perlu ditambahkan dibagian mana sehingga memang benar-benar revisi dua unit usaha ini benar-benar melibatkan masyarakat secara sepenuhnya bukan hanya kami sebagai pengurus

BUMDes dan pemerintah Desa yang membuat revisi melainkan melibatkan secara sepenuhnya kepada masyarakat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Hal senada juga seperti yang dikatan oleh kepala Desa Hadakewa (Bapak Klemen Kwaman), mengatakan bahwa

“untuk setiap refisi unit usaha tentunya kami harus feedback lagi hal apa yang kurang pada pengembangan dua unit usaha ini dan ini kami diskusikan secara langsung dengan masyarakat sehingga benar-benar revisi melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga adanya keputusan bersama bukan hanya pemerintah Desa dan pengurus BUMDes melainkan seluruh masyarakat dilibatkan guna mendukung kemajuan bersama” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa dan pengurus BUMDes selalu membuka keterbukaan dengan masyarakat dalam mendiskusikan atau revisi unit usaha dengan masyarakat dengan melihat kekurangan dalam setiap unit guna mendukung kemajuan bersama